

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Kolaborasi ketiga aktor dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kelurahan Kejiwan, yaitu Pemerintah Kelurahan Kejiwan, PT. Tirta Investama Danone-AQUA, dan LPTP Wonosobo melalui koordinasi dan komunikasi mampu menciptakan program CSR yang dirancang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat dan pendistribusian program yang tepat sasaran.
2. Keterlibatan *stakeholders* menciptakan legitimasi perusahaan. Melibatkan banyak pihak dalam proses penyelenggaraan CSR di Kelurahan Kejiwan mampu membentuk citra perusahaan yang dianggap peduli kepada komunitas atau kelompok masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan. Pelibatan anggota kelompok masyarakat secara langsung pada aktivitas pelayanan publik dan keikutsertaan LPTP Wonosobo sebagai fasilitator sekaligus pendamping program membuat anggota merasa lebih leluasa dalam penyampaian kritik dan saran kepada perusahaan. Status LPTP sebagai perantara dari pihak masyarakat sipil memungkinkan adanya rasa kedekatan kelompok masyarakat dan perusahaan terutama untuk penyampaian kebutuhan tiap-tiap Kelompok Masyarakat.

3. Keterlibatan *stakeholders* menciptakan anggapan bahwa Pemerintah tidak nirpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Terbangunnya komunikasi dan kolaborasi bersama sektor privat dan masyarakat sipil membuktikan bahwa pemerintah menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan layanan publik sehingga menggandeng aktor lain melalui pengelolaan CSR merupakan strategi kebijakan yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat. Selain itu, faktor *personal bonding* dan pengalaman pribadi terlibat dalam aktivitas publik jauh sebelum adanya program CSR PT. Tirta Investama telah menjadi pondasi kepercayaan personal pada pemerintah.
4. Terciptanya interdependensi atau ketergantungan antar aktor yang terlibat. Pengelolaan CSR yang melibatkan beberapa pihak, terutama kelompok masyarakat sebagai *stakeholder* yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan menciptakan hubungan saling membutuhkan. Kebijakan tentang CSR di Kelurahan Kejiwan, pada dasarnya merupakan hasil dari kolaborasi *stakeholders* yang terlibat. Salah satu contoh ketergantungan kebutuhan Kelompok Masyarakat Kejiwan dan Perusahaan yaitu ketika mereka tidak peduli pada tujuan perusahaan untuk melindungi kualitas sumber mata air sebagai salah satu motif diselenggarakannya CSR. Asalkan ada timbal balik dari keuntungan yang didapatkan dari penyelenggaraan program, karena program-program pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan tersebut

diharapkan mampu melahirkan *output* berupa kemandirian anggota kelompok dan ketersediaan tenaga kerja terampil yang berguna bagi masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kelurahan Kejiwan, PT. Tirta Investama Wonosobo, dan LPTP Wonosobo sebagai pengelola CSR harus memastikan bahwa *output* yang dihasilkan dari penyelenggaraan CSR menciptakan kemandirian dengan melakukan monitoring rutin secara berkala. Perlu diberikan kejelasan tentang status kemandirian kelompok masyarakat dalam kategori rintisan, penyapihan, maupun alih peran. Sehingga, hasil dari pelatihan dan pendampingan CSR dapat menjadi bekal anggota kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha dan komunitas dengan jaringan yang lebih luas.
2. PT. Tirta Investama Wonosobo sebagai aktor bidang bisnis, perlu menegaskan transparansi kebijakan. Aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan adalah prioritas utama perusahaan dalam mengejar profit, sehingga perlu diberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan bahwa aktivitas bisnis dan tanggung jawab sosial sama pentingnya untuk dilaksanakan. Hal tersebut akan semakin meningkatkan citra perusahaan dan mencegah kebingungan kelompok masyarakat tentang pengelolaan CSR.